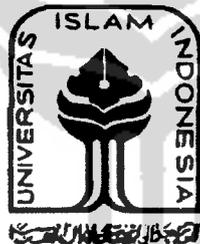


**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia**



oleh :

Nama : Gunawan Wahyudi Septian
Nomor Mahasiswa : 04312283
Program Studi : Akuntansi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI**

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang penulis ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran yang pernah ditulis atau diterbitkan penulis lain, yang penulis akui seolah-olah sebagai tulisan penulis sendiri, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 22 Oktober 2008

Penulis

Gunawan Wahyudi Septian

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI INDONESIA**

disusun dalam rangka menulis skripsi

oleh :

Nama : Gunawan Wahyudi Septian
Nomor Mahasiswa : 04312283
Program Studi : Akuntansi

Yogyakarta, 22 Oktober 2008

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Mahmudi, S.E., M.Si

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

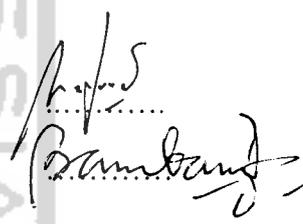
**Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Pendapatan Asli Daerah di Indonesia**

Disusun Oleh: GUNAWAN WAHYUDI SEPTIAN
Nomor Mahasiswa: 04312283

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 November 2008

Pembimbing Skripsi/Penguji : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dekan, Ishaq, M.Bus, Ph.D

MOTTO

Barang siapayang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Alloh akan memudahkan baginya jalan ke surga.

(H.R . Muslim)

Jadikanlah sabardan sholatsebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang – orang yang khusuk.

(QS. AL- Baqoroh: 45)

Sesungguhnya setelah kesusahan itu adakemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari urusan sesuatu) kerjakanlah dengan sungguh –sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu menggantungkan pengharapan.

(Al . Ihsyiroh :6 – 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta doanya.
2. Kakak-kakak dan keponakanku tercinta yang selalu memberi nasihat berarti dalam hidupku.
3. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, dorongan, persahabatan, dan persaudaraan.
4. Pihak-pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seseorang yang ada dihatiku, makasih atas pengertian dan dukungannya selama ini.
7. Almamaterku.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Semakin banyaknya proporsi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai adanya peningkatan mutu pelayanan publik dan meningkatnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Hal ini akan mengakibatkan adanya tingkat partisipasi masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang berupa data realisasi belanja modal, realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi produk domestik regional bruto. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana, regresi berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan taraf signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$. Akan tetapi, belanja modal juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.02 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ dan akhirnya mempengaruhi pendapatan asli daerah dengan signifikansi sebesar $0.002 < 0.05$.

Kata kunci : belanja modal, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, produk domestik bruto

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya yang telah dilimpahkan dan dikaruniakan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Di Indonesia”.

Dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir penulis sadar akan adanya bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. DR. Edy Suandi Hamid M.EC, selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Mahmudi, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi maupun akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Budi Astuti M.M atas masukan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini terutama dalam hal ilmu statistika.
5. Seleuruh Staf Pengajar dan Administrasi Fakultas Ekonomi UII Program Studi Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Orang tua dan kakakku. Terima kasih atas pengarahan, dukungan, semangat, doa dan bantuan baik materiil dan moril dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Igor Simatupang atas masukan dan saran-sarannya.
8. *My team organization Entrepreneur Community (EC) FE UII* Mr.Buddy, Iswan, Mukti, Bangun dan semua teman-teman EC terima kasih atas semua pengalaman yang diberikan serta terima kasih atas semua yang kita kerjakan bersama. Tetap semangat!
9. *My best friend* Mas Hendy, Nasir, Milis, Irfan, Bahri, Nasrul, Desi, Velin di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, terima kasih atas jalinan kerjasamanya selama ini.
10. Teman-temanku seperjuangan di KOMISI, terima kasih dukungan dan kerjasamanya selama ini.
11. Teman-teman kelompok bermain *in the kost* Erik Medan, dik Irfan yang aneh sendiri, Mukti Magelang, Pacul dan tentunya Banu Cilacap sing ngapak-ngapak dan anak Rira 17. Terima Kasih atas bantuan dalam memberikan penyegaran suasana yang beda dari yang lain.
12. Teman-temanku yang baik, Andri, Aryo, Denny, Fuad, Aldi, Hari, Anjir, Totok, Rudi, semangat terus jangan berhenti sebelum tercapai impianmu.
13. Ike Herlina Sari, terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak akan dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 18 November 2008

Gunawan Wahyudi Septian



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Sampul Depan.....	ii
Halaman Judul Skripsi.....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Halaman Pengesahan Skripsi.....	v
Halaman Berita Acara Ujian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Abstrak.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Sistematika Pembahasan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

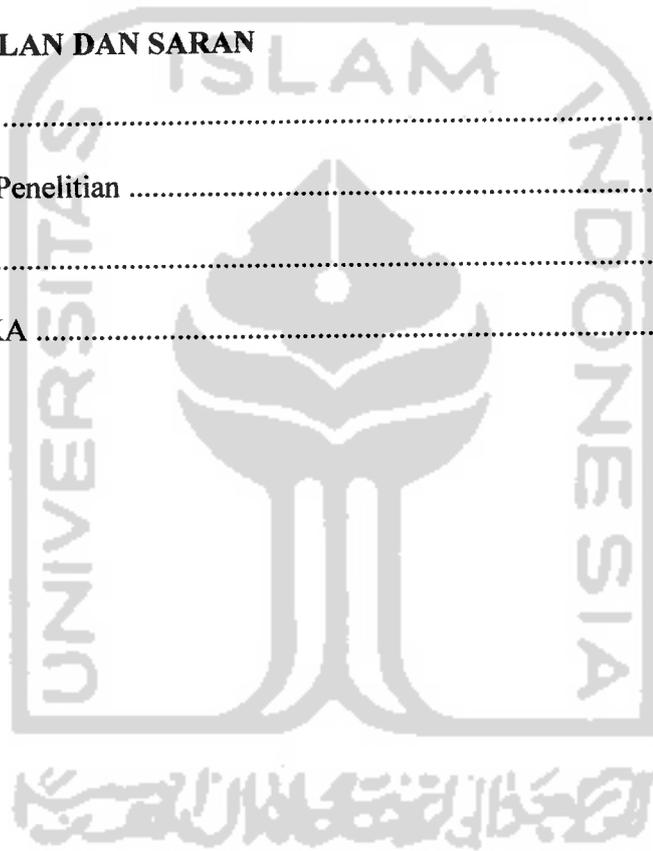
2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.2. Pendapatan Asli Daerah	12
2.2.1. Pajak Daerah.....	13
2.2.2. Retribusi.....	14
2.2.3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.....	15
2.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.....	16
2.3. Belanja Modal.....	16
2.4. Penelitian Terdahulu Dan Penarikan Hipotesa	19
2.4.1. Hasil Penelitian Terdahulu	19
2.4.2. Penarikan Hipotesa	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel.....	25
3.2. Teknik Pengumpulan Data	26
3.3. Alat Analisis	27
3.4. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	27
3.4.1. Definisi Operasional	27
3.4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	27

3.4.1.2. Produk Domestik Regional Bruto.....	28
3.4.1.3. Belanja Modal.....	29
3.4.1.4. Pendapatan Asli Daerah.....	29
3.4.2. Pengukuran Variabel	31
3.5. Model Penelitian.....	32
3.6. Metode Analisis Data	33
3.6.1. Analisis Regresi.....	35
3.6.1.1. Regresi Sederhana.....	35
3.6.1.2. Regresi Berganda.....	36
3.6.2. Hubungan Langsung dan Tidak Langsung.....	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Variabel Penelitian	39
4.2. Hasil Pengujian.....	44
4.2.1 Analisa Regresi.....	45
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
4.2.2.1 Multikolinieritas.....	51
4.2.2.2 Heteroskedastisitas.....	52
4.2.2.3 Autokorelasi.....	53
4.2.2.3 Normalitas.....	56
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59

4.3.1. Pembahasan Hipotesa Pertama	59
4.3.2. Pembahasan Hipotesa Kedua.....	60
4.3.3. Pembahasan Hipotesa Ketiga	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1.1. Kesimpulan	62
1.2. Keterbatasan Penelitian	63
1.3. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



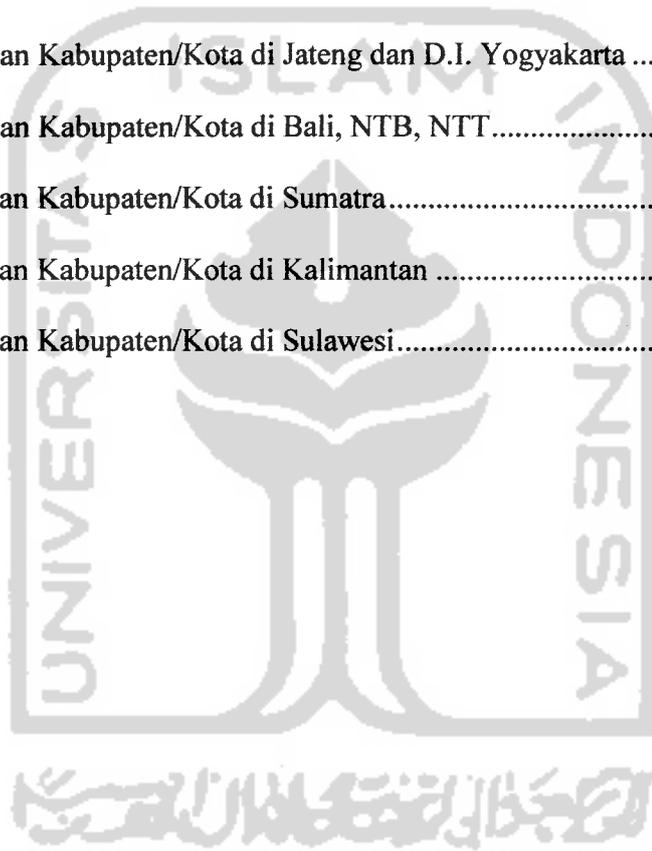
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota Propinsi Jateng & DIY	40
Tabel 4.2 Kabupaten dan Kota Propinsi Kalimantan	41
Tabel 4.3 Kabupaten dan Kota Propinsi Bali, NTB, NTT	42
Tabel 4.4 Kabupaten dan Kota Propinsi Sulawesi	43
Tabel 4.5 Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatra	44
Tabel 4.6 Uji Regresi Sederhana	46
Tabel 4.7 Uji Koefisien determinasi Regresi Sederhana.....	46
Tabel 4.8 Uji Regresi Berganda	48
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi Regresi Berganda.....	48
Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas.....	51
Tabel 4.11 Nilai Uji Heterokedastisitas (1).....	52
Tabel 4.12 Nilai Uji Heterokedastisitas (2).....	53
Tabel 4.13 Tingkat Autokorelasi.....	54
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson (1)	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson (2)	55
Tabel 4.16 Signifikansi Antarvariabel	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Penelitian Kabupaten/Kota di Jateng dan D.I. Yogyakarta	69
2. Data Penelitian Kabupaten/Kota di Bali, NTB, NTT.....	70
3. Data Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatra.....	71
4. Data Penelitian Kabupaten/Kota di Kalimantan	73
5. Data Penelitian Kabupaten/Kota di Sulawesi.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh menteri keuangan Budiono, tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang No.

22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah dan membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar-pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Hal tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya tanpa harus melibatkan pusat karena campur tangan pemerintah pusat dianggap menyebabkan daerah mengalami stagnasi kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki daerah, sehingga proses pembangunan dan kehidupan berdemokrasi di daerah tidak berjalan lancar.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang ini mengatur tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda yang ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana perimbangan tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dari dana perimbangan tersebut,

Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan lain-lain daerah yang sah

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas modal dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Maka dari itu pemerintah daerah membuat perubahan alokasi belanja modal yang lebih besar dengan harapan dapat menaikkan kapasitas fiskal. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan

Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negative jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya.

Belanja modal daerah sangat berpengaruh terhadap kesempatan investasi bagi daerah. Asumsinya adalah belanja modal dapat meningkatkan PAD yang diikuti adanya pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. PAD merupakan indikator untuk mengukur kemandirian daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD, maka peneliti melakukan penelitian berjudul **"Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia"**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Indonesia ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Indonesia ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Menambah pengetahuan tentang teori maupun praktik-praktik akuntansi pada Pemerintahan di Indonesia.
 - b) Penelitian ini merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Pemerintah
 - a) Memberikan masukan bagi Pemerintah, khususnya sejauh mana Pemerintah Daerah di masa otonomi menetapkan tingkat pengeluaran/belanja daerahnya masing-masing.
 - b) Membuka wawasan baru mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia.
3. Bagi Pendidikan Akuntansi

Dapat menambah topik kepustakaan, khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik/ Akuntansi Pemerintahan.

1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian Pustaka

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci tentang kajian pustaka meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, belanja modal dan metode empiris yang tercantum pada proposal penelitian. Selain itu pada bab ini juga terdapat hasil penelitian terdahulu dan perumusan hipotesa.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian secara umum mengenai populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat analisis, definisi operasional dan pengukuran variabel, model penelitian, metode analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan hasil yang diperoleh. Pembahasan hasil yang diperoleh berupa analisa kualitatif dengan menggunakan berbagai rumus yang sesuai dengan pokok masalah.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat secara singkat tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 370 kabupaten dan 95 kota yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dan memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Untuk itu setiap daerah menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat yang jumlahnya sudah ditentukan masing-masing berdasarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut. Hal itu dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu cara untuk mewujudkan perekonomian daerah adalah membuka investasi modal. Semua itu dilakukan dengan harapan pertumbuhan ekonomi tiap daerah mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan kegiatan ekonomi menuju ke arah yang lebih baik sehingga terjadi kemakmuran dan kemandirian daerah. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya meningkatkan investasi modal dan memberikan kualitas pelayanan kepada publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi

dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Sumber utama pertumbuhan juga berasal dari peningkatan produktivitas seluruh perekonomian. Di tengah kesulitan pengalokasian sumber-sumber dana investasi maka produktivitas masyarakat dan efisiensi perekonomian perlu terus diupayakan peningkatannya guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal itu, perlu dipahami bahwa usaha peningkatan produktivitas nasional pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok. Yang pertama, bahwa proyek-proyek pembangunan, baik di sektor negara maupun swasta, perlu dipilih secara tepat sehingga seluruh dana yang terkumpul dapat dialokasikan kepada proyek-proyek yang produktif, menunjang ekspor non migas, serta memperluas lapangan kerja. Kedua, produktivitas nasional berkaitan secara langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga program nasional di bidang pendidikan dan latihan harus mendapat perhatian yang cukup besar. Ketiga, pemakaian teknologi tepat guna harus diterapkan di semua tingkat produksi, agar tidak saja diperoleh produktivitas yang optimal tetapi juga memberikan landasan bagi penerapan teknologi di masa mendatang.

Untuk mempercepat pembangunan, kebutuhan akan modal bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Modal tersebut harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor produktif. Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi, dan stok barang kapital. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, sumber alam merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok modal yang ada (Boediono, 1999).

Menurut Sadono Sukirno (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dengan perkataan lain, perkembangan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah pada tahun berikutnya.

Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan/peningkatan dari GDP potensial atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yakni sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pembentukan modal, perubahan teknologi dan inovasi.

Boediono (1992) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada arti proses di sini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama misalnya 10, 20 tahun atau 50 tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecenderungan yang bersumber proses internal perekonomian itu artinya harus berasal dari kekuatan yang ada dalam perekonomian itu sendiri.

Menurut Todoro (1997), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah:

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumberdaya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.
3. Kemajuan teknologi.

Masalah pertumbuhan dan pemerataan senantiasa menjadi bahan perdebatan yang tiada habisnya. Kedua hal ini sering dihadapkan dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ada saja sekelompok minoritas yang terus bertabrakan dengan kelompok *mainstream*. Hal ini tidak terkecuali dengan pendapat mereka mengenai kaitan antara pertumbuhan dan pemerataan. Hubungan antara keduanya sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, di satu pihak ada yang berpendapat sebaliknya.

Kelompok yang kedua inilah yang di dunia internasional termasuk minoritas, memang jumlah negara yang berhasil memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan tidak banyak, justru yang banyak adalah yang berhasil menciptakan pertumbuhan tinggi tetapi dibarengi ketimpangan yang semakin lebar.

Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan perkapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro 2004) :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat yang berasal dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. PDRB juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ketahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian daerah yakni:

- a) Pertanian, perikanan dan kelautan
- b) Pertambangan dan penggalian
- c) Industri pengolahan
- d) Listrik, gas, dan air bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- g) Angkutan dan komunikasi

h) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

i) Jasa-jasa

2.2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang menjadi hak untuk dinikmati oleh daerah otonom dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya. Besarnya PAD yang diperoleh mencerminkan daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut Abdul Halim (2002), dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain.

Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang bersumber dari :

- a. pajak daerah
- b. retribusi daerah
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. lain-lain PAD yang sah

2.2.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh dari orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2004) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan kata lain pajak digunakan untuk memenuhi fasilitas publik sehingga meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi :

- a. Pajak Propinsi terdiri atas :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan
7. Pajak Parkir

2.2.2. Retribusi

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 dan PP No. 66 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan :

1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan penguburan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan lain-lain.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti : Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan lain-lain.

2.2.3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-Undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi

pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain, bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah dan lain-lain.

2.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Yang termasuk dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah antara lain : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain.

2.3. BELANJA MODAL

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Di dalam keputusan menteri No. 29/ 2002 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat)

Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur daerah adalah bagian belanja berupa Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Sementara belanja pelayanan publik adalah bagian belanja berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Belanja pembangunan/modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, alat-alat studio, belanja modal alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat

laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan.

Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam setiap menyusun anggaran belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung kantor yang baru dan direnovasi sedapat mungkin ditunda. Penggunaan dana lebih diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemulihan kondisi ekonomi serta pembukaan lapangan kerja. Apabila sangat mendesak dimungkinkan untuk sewa gedung.
2. Pengadaan kendaraan bermotor lebih diutamakan untuk antar jemput pegawai dan pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulans, pengangkut sampah, dan untuk kendaraan sejenis lainnya. Pengadaan kendaraan bermotor untuk kepentingan operasional legislatif dan eksekutif supaya dihindari.
3. Pembagian belanja pembangunan/modal ke dalam sektor, subsektor dan program selama ini berlaku masih tetap dipakai secara selektif sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.4. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENARIKAN HIPOTESA

2.4.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penerapan desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Gates (1995) membuktikan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan daerah. Lin dan Liu (2000) membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Madiasmu, 2002; Wong, 2004).

Saragih (2003) menyatakan bahwa, peningkatan PAD sebenarnya eksek dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Bappenas (2000) yang menyatakan pertumbuhan PAD harus sensitif dengan kenaikan PDRB. Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan hubungan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Wong (2002) menunjukkan bahwa ada kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah melakukan pembangunan pada sektor industri. Lin dan Liu (2000) berhasil membuktikan adanya korelasi yang kuat antara *share*/belanja investasi dengan tingkat desentralisasi. Di Indonesia penelitian tentang Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, pernah dilakukan oleh Priyo Hari Adi yang mengambil sampel penelitian

kabupaten dan kota se-Jawa-Bali tahun 1998-2003. Data dikelompokkan menjadi data sebelum dan data sesudah pelaksanaan desentralisasi. Data sebelum desentralisasi adalah data APBD, PDRB maupun pendapatan perkapita untuk tahun 1998-2000. Sedangkan data sesudah pelaksanaan desentralisasi adalah data-data yang sama untuk tahun 2001-2003.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa bukti empiris antara lain bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Tetapi pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten/kota masih kecil. Akibatnya penerimaan PADnyapun kecil. Berkaitan dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan kali ini adalah penulis ingin mengetahui “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Sedangkan sampel yang digunakan yakni kabupaten dan kota di Indonesia periode anggaran menggunakan periode tahun 2002–2005 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh penulis.

2.4.2. Penarikan Hipotesa

1. Peranan Belanja Modal dalam Desentralisasi Fiskal.

Optimalisasi Penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan membebani masyarakat menjadi disinsentif bagi

daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai peraturan daerah baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001, bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung ruginya (*cost & benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi bisa jadi disebabkan kualitas pelayanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002). Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002). Dari 803 peraturan daerah penerimaan daerah, 90.3% merupakan retribusi (Lewis, 2003). Namun, banyaknya peraturan daerah ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat pelayanan publik yang masih rendah.

Pergeseran komposisi belanja ini juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu

(dalam hal ini sektor retail dan jasa) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Marjidi, 1997)

Dari pemaparan diatas dapat ditarik dua Hipotesa berikut:

Hipotesa 1 (H1)

Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Hepotesa 3 (H3)

Belanja modal mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PAD

2. Arti Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bagi Kemandirian Daerah

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin dibatasi.

Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan ini:

- a) Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.

- b) Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain lebih fluktuatif dan cenderung di luar kontrol atau kewenangan pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas, 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada 2001 menjadi 7,33 %. Pada 2002 (Bapennas, 2004) dengan sumber utama penerimaan pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %.

Lewis (2003) menemukan, terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemerintah daerah, yaitu sebesar 56% untuk pemerintah propinsi dan 103% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi masing-masing pemerintah daerah sebesar 76% dan 46%. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Dari gambar ini seharusnya pemerintah daerah harus lebih konsentrasi pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi.

Sektor-sektor Industri, khususnya jasa perlu dioptimalkan. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadjetmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain, pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi beberapa PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan Bappenas (2003) pada pemerintah provinsi menunjukkan ada 12 provinsi (41,37%) yang mempunyai elastisitas > 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Sedangkan provinsi yang lain PDRBnya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak, keluar dari daerah tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal, hal ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintahan dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2002; Saragih, 2003; Bappenas, 2003).

Dari uraian di atas dapat dikembangkan hipotesa:

Hipotesa 2 (H2)

Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan PAD

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia adalah sebanyak 370 kabupaten dan 95 kota yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia (sumber :BPS). Di Indonesia terjadi penggabungan, penghapusan, dan pembentukan daerah yang baru selama kurun waktu lima tahun (tahun 2001 sampai tahun 2005), maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daerah/kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Indonesia
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyertakan Laporan Realisasi APBD tahun 2002-2005.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2002-2005.
4. Pemerintah daerah yang tidak mengalami pemekaran wilayah antara tahun 2002-2005.

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia yang berupa realisasi belanja modal dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing

pemerintah kabupaten kota yang ada dan juga data produk domestik regional bruto (PDRB) harga konstan 2000 dari masing-masing pemerintah kabupaten kota di Indonesia.

Penulis memilih objek penelitian di seluruh kabupaten/ kota di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 370 Kabupaten dan 95 kota yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan desentralisasi fiskal di seluruh Indonesia.

Data tersebut diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan situs Sistem Informasi Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui internet untuk periode tahun 2002-2005.

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Cara pemilihan data akan dilakukan secara tidak random atau bersifat purposive. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel dilakukan untuk menghindari salah spesifikasi (*misspecification*) dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis, selain itu pemilihan data secara *purposive* ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas.

3.3. ALAT ANALISIS

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan berganda (*multiple regression*). Analisa regresi sederhana untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Data diolah dengan bantuan software SPSS.

3.4. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

3.4.1. Definisi Operasional

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya tingkat kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang akan menghasilkan kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini akan terjadi bila masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Contohnya, dengan meningkatnya investasi maka secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan akan modal sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi di suatu daerah, seperti : pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Modal tersebut

harus digunakan untuk kepentingan masyarakat yang berupa kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor produktif. Seperti teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi, dan stok barang modal. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, sumber alam merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok modal yang ada (Boediono, 1999).

b) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya yang berasal dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun (Abdul Halim, 2002).

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian daerah yakni:

- a) Pertanian, perikanan dan kelautan
- b) Pertambangan dan penggalian
- c) Industri pengolahan
- d) Listrik, gas dan air bersih

- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Angkutan dan komunikasi
- h) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- i) Jasa-jasa

c) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

d) Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2002), dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:
 - a. Pajak Propinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan (iv) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) pajak hotel, (ii) pajak restoran, (iii) pajak hiburan, (iv) pajak reklame, (v) pajak penerangan jalan, (vi) pajak pengambilan bahan galian golongan C, (vii) pajak parkir.
 - d. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) retribusi jasa umum, (ii) retribusi jasa usaha, (iii) retribusi perijinan tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
 - a. Bagian laba perusahaan milik daerah.

- b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
4. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Penerimaan jasa giro.
 - c. Penerimaan bunga deposito.
 - d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR).

3.4.2. Pengukuran Variabel

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Di penelitian ini variabel terikat adalah pendapatan asli daerah untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebasnya adalah belanja modal masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada.

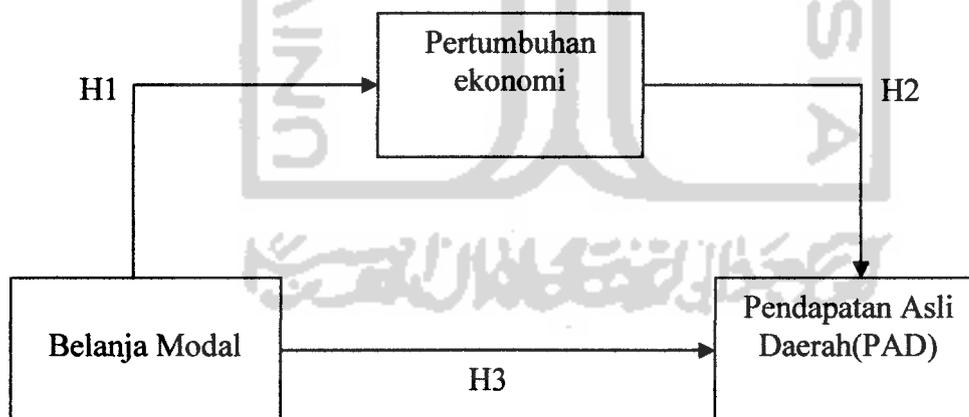
2. Variabel Perantara (*Intervening Variable*)

Variabel perantara merupakan variabel yang berada di dalam model, di luar variabel bebas dan terikat. Secara definitif variabel perantara

didefinisikan sebagai variabel yang mempengaruhi secara tidak langsung variabel terikatnya. Karena tidak mempengaruhi secara langsung, variabel perantara dapat memperkuat/melemahkan pengaruh prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel perantara adalah pertumbuhan ekonomi untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.

3.5. MODEL PENELITIAN

Untuk melihat model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Paradigma penelitian pada penelitian di atas memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh belanja modal. Akan tetapi, belanja modal juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya

mempengaruhi pendapatan asli daerah. Variabel pertumbuhan ekonomi ini dapat disebut sebagai variabel perantara (*intervening*).

Analisa ini akan menguji apakah sebenarnya belanja modal mempunyai pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah ataukah melalui pertumbuhan ekonomi.

3.6. METODE ANALISIS DATA

Untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, alat analisis statistik yang digunakan adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan *Software* SPSS.

Selain melakukan pengujian dengan regresi berganda, juga dilakukan uji asumsi klasik antara lain:

1. Multikolinieritas

Artinya antara *independent variable* yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau yang mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau $= 1$). Konsekuensi kesalahan standar estimasi cenderung meningkat dengan bertambahnya *independent variable*, tingkat signifikan untuk menolak hipotesa nol semakin besar dan probabilitas menerima hipotesa yang salah juga akan semakin besar. Akibatnya model regresi tidak valid untuk menaksir nilai *dependent variable*.

Analisis untuk mengetahui adanya multikolinieritas sebagai berikut:

Melihat t hitung, R^2 dan F ratio. Jika R^2 tinggi, nilai F ratio tinggi sedangkan sebagian besar atau seluruh koefisien regresi tidak signifikan (nilai t hitung sangat rendah). Menentukan koefisien korelasi antara *independent variable* yang satu dengan yang lain. Jika antara dua *independent variable* memiliki korelasi yang spesifik maka di dalam model regresi terdapat multikoleneritas.

2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas artinya varian variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensinya adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala Heteroskedastisitas yaitu dengan metode park, metode gletser, metode spearman rank correlation dan metode goldfield-quandt.

3. Autokorelasi

Autokorelasi berarti terjadi korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensinya varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Model regresinya tidak dapat untuk menaksir nilai variabel dependent pada nilai variabel independent tertentu.

Untuk menganalisis adanya autokorelasi yang dipakai adalah racioneuman dan uji durbin watson. Pengaruh auto korelasi yang terdapat dalam suatu model regresi dihilangkan dengan memasukkan lag variabel independennya

4. Normalitas

Menguji apakah sebuah model regresi, *dependent variable*, *independent variable* atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Deteksi normalitas dengan melihat penyebab data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

1. Jika data menyebar dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak mengikuti asumsi normalitas.

3.6.1 Analisa Regresi

3.6.1.1 Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana (*simple regression*) dapat digunakan untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang akan dirinci sebagai berikut:

- a) Untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + b x_{(t-1)} + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel tergantung

a = Konstanta yang menunjukkan besar nilai y bila nilai $x=0$

- b = Konstanta yang menunjukkan besar nilai x dalam menentukan besar y .
- x = Belanja modal sebagai variabel bebas.
- ε = Error/kesalahan

3.6.1.2 Regresi Berganda

Regresi berganda (*multiple regression*) digunakan untuk Menguji pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan asli Daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1 x_{1(t-1)} + b_2 x_{2(t-1)} + \varepsilon$$

Dimana:

- y = Pendapatan Asli Daerah
- a = Konstanta yang menunjukkan besar nilai bila nilai $x = 0$
- $b_{1,2}$ = Konstanta yang menunjukkan besar nilai x dalam menentukan besar y .
- x_1 = Belanja modal satu tahun sebelum tahun anggaran sebagai variabel bebas.
- x_2 = Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara.
- ε = Error (kesalahan)

3.6.2. Hubungan Langsung dan Tidak Langsung

$$Y_1 = a + b_1 x_{1(t-1)} + \varepsilon$$

$$Y_2 = a + b_2 x_{2(t-1)} + \varepsilon$$

$$Y_3 = a + b_1 x_{3(t-1)} + \varepsilon$$

$$\text{Pengaruh tidak langsung} = Y_3 + (Y_1 * Y_2)$$

Dimana :

Y_1 = Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel tergantung (belanja modal ke pertumbuhan ekonomi)

Y_2 = Pendapatan asli daerah (pertumbuhan ekonomi ke pendapatan asli daerah)

Y_3 = Pendapatan asli daerah (belanja modal ke pendapatan asli daerah)

a = Konstanta yang menunjukkan besar nilai y bila nilai $x=0$

$b_1 - b_2$ = Konstanta yang menunjukkan besar peran x dalam menentukan besar y .

$x_{1,3}$ = Belanja modal sebagai variabel bebas

x_2 = Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

ε = Error (kesalahan)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum diyakini desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini apabila Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan Kabupaten setempat dapat menggenjot kenaikan PAD, misalnya melalui pajak dan restribusi dan diimbangi dengan peningkatan efektifitas sektor-sektor perekonomian. Langkah kebijakan semacam ini dapat berpengaruh baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah serta kesejahteraan masyarakatnya.

Tingginya sektor-sektor perekonomian dalam suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan besarnya PAD dan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara memberdayakan rakyat atau mengembangkan potensi yang ada. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. Dari gambaran tersebut, dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini digunakan data sampel penelitian yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat dengan periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan *SPSS for Windows*. Agar diperoleh model yang memenuhi asumsi metode *Best Linear Unbias Estimator (BLUE)*, maka dilakukan pengujian dengan asumsi klasik.

4.1. DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN

Setelah melihat dan melakukan tabulasi data, dari 232 kabupaten/kota di propinsi Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera dapat diambil kesimpulan bahwa data yang memenuhi syarat untuk dianalisa adalah sebanyak 132 sampel, terdiri dari 40 kabupaten/kota di Propinsi Jateng dan DIY, 23 kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan, 9 kabupaten/kota di Propinsi Bali, 7 kabupaten/kota di propinsi NTB, dan 12 kabupaten/kota di propinsi NTT, 24 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi, dan 17 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kabupaten dan Kota Propinsi Jateng & DIY

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Kulon Progo
2	Kabupaten Bantul
3	Kabupaten Gunung Kidul
4	Kabupaten Sleman
5	Kota Yogyakarta
6	Kabupaten Cilacap
7	Kabupaten Banyumas
8	Kabupaten Purbalingga
9	Kabupaten Banjarnegara
10	Kabupaten Kebumen
11	Kabupaten Purworejo
12	Kabupaten Wonosobo
13	Kabupaten Magelang
14	Kabupaten Boyolali
15	Kabupaten Klaten
16	Kabupaten Sukoharjo
17	Kabupaten Wonogiri
18	Kabupaten Karanganyar
19	Kabupaten Sragen
20	Kabupaten Grobogan
21	Kabupaten Blora
22	Kabupaten Rembang
23	Kabupaten Pati
24	Kabupaten Kudus
25	Kabupaten Jepara
26	Kabupaten Demak
27	Kabupaten Semarang
28	Kabupaten Temanggung
29	Kabupaten Kendal
30	Kabupaten Batang
31	Kabupaten Pekalongan
32	Kabupaten Pemalang
33	Kabupaten Tegal
34	Kabupaten Brebes
35	Kabupaten Magelang
36	Kabupaten Surakarta
37	Kabupaten Salatiga
38	Kabupaten Semarang
39	Kabupaten Pekalongan
40	Kabupaten Tegal

Tabel 4.2
Kabupaten dan Kota Propinsi Kalimantan

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Sambas
2	Kabupaten Landak
3	Kabupaten Pontianak
4	Kabupaten Sanggau
5	Kabupaten Ketapang
6	Kabupaten Sintang
7	Kabupaten Kapuas Hulu
8	Kota Pontianak
9	Kota Singkawang
10	Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Kabupaten Kotawaringin Timur
12	Kabupaten Barito Selatan
13	Kota Palangkaraya
14	Kabupaten Tanah Laut
15	Kabupaten Banjar
16	Kabupaten Barito Kuala
17	Kabupaten Tapin
18	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
19	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
20	Kabupaten Hulu Sungai Utara
21	Kabupaten Tabalong
22	Kota Banjarmasin
23	Kota Samarinda

Tabel 4.3
Kabupaten dan Kota Propinsi Bali, NTB, dan NTT

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Jembrana
2	Kabupaten Tabanan
3	Kabupaten Badung
4	Kabupaten Gianyar
5	Kabupaten Klungkung
6	Kabupaten Bangli
7	Kabupaten Karangasem
8	Kabupaten Buleleng
9	Kota Denpasar
10	Kabupaten Lombok Barat
11	Kabupaten Lombok Tengah
12	Kabupaten Lombok Timur
13	Kabupaten Sumbawa
14	Kabupaten Dompu
15	Kota Bima
16	Kota Mataram
17	Kabupaten Sumba Barat
18	Kabupaten Sumba Timur
19	Kabupaten Kupang
20	Kabupaten Timur Tengah Selatan
21	Kabupaten Timur Tengah Utara
22	Kabupaten Alor
23	Kabupaten Lembata
24	Kabupaten Sikka
25	Kabupaten Ende
26	Kabupaten Ngada
27	Kabupaten Manggarai
28	Kota Kupang

Tabel 4.4
Kabupaten dan Kota Propinsi Sulawesi

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Selayar
2	Kabupaten Sidenreng Rappang
3	Kabupaten Sinjai
4	Kabupaten Soppeng
5	Kabupaten Takalar
6	Kabupaten Tana Toraja
7	Kabupaten Wajo
8	Kota Pare-pare
9	Kota Makassar
10	Kabupaten Pangkajene dan kepulauan
11	Kabupaten Maros
12	Kabupaten Bantaeng
13	Kabupaten Barru
14	Kabupaten Bone
15	Kabupaten Bulukumba
16	Kabupaten Enrekang
17	Kabupaten Gowa
18	Kabupaten Jeneponto
19	Kabupaten Luwu
20	Kabupaten Luwu utara
21	Kabupaten Buton
22	Kabupaten Kendari
23	Kabupaten Kolaka
24	Kota Bau-Bau

Tabel 4.5
Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera

No	Kabupaten/Kota
1	Kota Solok
2	Kota Sawahlunto
3	Kota Padang
4	Kota Padang Panjang
5	Kabupaten Tanah Datar
6	Kabupaten Solok
7	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
8	Kabupaten Pasaman
9	Kabupaten Padang Pariaman
10	Kabupaten Agam
11	Kabupaten Limapuluh Kota
12	Kota Lubuk Linggau
13	Kota Palembang
14	Kabupaten Muara Enim
15	Kabupaten Musi Rawas
16	Kabupaten Musi Banyuasin
17	Kabupaten Labuhan Batu

Sumber: wikipedia ensiklopedia online (id.wikipedia.org)
Update terbaru tgl 30 Desember 2008.

4.2. HASIL PENGUJIAN

Untuk membuktikan ketiga hipotesa yang diajukan, maka teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis

statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesa penelitian. Dalam penelitian ini alat analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

4.2.1. Analisa Regresi

Analisa regresi dipakai untuk mencari besarnya hubungan dan juga menentukan besarnya pengaruh variabel Independen belanja modal terhadap variabel dependent PAD dan Pertumbuhan Ekonomi. Dalam melakukan pengujian hipotesa peneliti melakukan dua uji regresi, regresi sederhana dan regresi berganda. Uji regresi sederhana dilakukan untuk menguji hipotesa 1(H1) sedangkan regresi berganda untuk menguji hipotesa 2 dan 3 (H2, H3). Perbedaan penggunaan alat regresi hanya terdapat pada jumlah variabel independennya, jika regresi sederhana hanya satu variabel independent sedangkan regresi berganda lebih dari satu variabel independen. Hasil dari pengolahan data dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesa 1

H1 : Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode enter. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan dalam analisis adalah belanja modal sebagai variabel independent dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent.

Tabel 4.6
Uji Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.232	.400		13.093	.000
Belanja Modal	.152	.065	.117	2.342	.020

a. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi Regresi Sederhana

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.317a	.100	.083

a. Predictors : (constant), Belanja Modal
b. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil pengujian diatas maka dapat disusun suatu persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1 x_{1(t-1)} + \varepsilon$$

Dimana :

$$a = 5,232$$

$$b_1 = 0.152$$

$$Y_1 = 5,232 + 0,152 X$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 5,232 menyatakan bahwa jika tidak ada belanja modal, maka pertumbuhan ekonomi adalah 5,232. Dengan kata lain bila tidak ada belanja modal tahun lalu maka

besarnya pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan adalah sebesar 5,232.

Koefesien regresi sebesar 0.152 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.152 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Atau dengan kata lain jika jumlah belanja modal tahun lalu naik sebesar satu per satuan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.152 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Nilai koefesien jalur dapat dilihat pada kotak *Coefficient Standardized Coeffisien Beta*.

Hasil uji signifikansi seperti pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa diperoleh t statistic sebesar 2,342 dengan nilai signifikansi sebesar 0.020 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditolelir yakni 0.05 maka H₀ ditolak, atau dengan kata lain H_a diterima. Ini berarti bahwa perubahan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi atau rendah belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* yaitu 0.083 atau sebesar 8.3%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera dapat dijelaskan oleh belanja modal tahun lalu.

Dari kolom *Standardized Coefficients* pada tabel 4.13 analisa jalur dapat dilihat, analisa jalur adalah perluasan dari analisa regresi. Perluasan ini terletak pada kelengkapan penelusuran kausal. Lewat analisa jalur peneliti dapat melihat variabel mana yang merupakan pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung. Nilai koefesien jalur belanja modal adalah sebesar 0.117 atau sebesar 11.7%.

2. Pengujian Hipotesa 2 dan Hipotesa 3

H2 : Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah

H3 : Pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan asli daerah

Tabel 4.8
Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.670	.177		3.779	.000
Belanja Modal	.785	.024	.857	5.358	.000
Pertumbuhan Ekonomi	.132	.019	.455	3.716	.002

a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi Regresi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.853a	.728	.727

a. Predictors : (constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

b. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan (*removed*) atau dengan kata lain kedua variable bebas dimasukkan dalam perhitungan regresi. Dalam analisis adalah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent dan PAD sebagai variabel dependent.

Dari hasil pengujian diatas maka dapat disusun suatu persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1 x_{1(t-1)} + \varepsilon$$

$$Y_2 = a + b_2 x_2 + \varepsilon$$

Dimana :

$$a = 0,670$$

$$b_2 = 0,032$$

$$Y_1 = 0,670 + 0,785 X$$

$$Y_2 = 0,670 + 0,132 X$$

Dari persamaan Y1 dan Y2 diatas dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,670 menyatakan bahwa jika tidak ada belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variable bebas, maka PAD adalah sebesar 0,670. Dengan kata lain bila tidak ada belanja modal tahun lalu maka besarnya PAD pada tahun berjalan adalah sebesar 0,670. dengan kata lain bila tidak ada pertumbuhan ekonomi ditahun lalu maka besarnya PAD pada tahun berjalan akan sebesar 0,670.

Koefesien regresi belanja modal sebesar 0.785 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% belanja modal akan meningkatkan PAD sebesar 0. 785 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Atau dengan kata lain jika jumlah belanja modal tahun lalu naik sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0. 785 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Pada koefesien regresi pertumbuhan ekonomi dengan koefesien sebesar 0,132 menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka PAD di Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera akan meningkat sebesar

0,132 atau sebesar 13.2% dengan asumsi variable lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi seperti pada tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa untuk belanja modal diperoleh t statistic sebesar 5.358 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditolelir yakni 0.05 maka H_0 ditolak, atau dengan kata lain H_a diterima yang berarti bahwa semakin besar belanja modal maka semakin besar pula PAD Kabupaten/Kota di Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi diperoleh t statistic sebesar 3.716 dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 yang nilainya jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditolelir yakni 0.05 maka H_0 ditolak, atau dengan kata lain H_a diterima yang berarti bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula PAD Kabupaten/Kota di Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera.

Sedangkan untuk pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap PAD ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu 0.727 atau sebesar 72.7%. Hal ini berarti bahwa PAD di Kabupaten/Kota di Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera 72.7% dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi tahun lalu.

Koefisien jalur belanja modal adalah sebesar 0.857 dan koefisien jalur pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.455. Diketahui juga bahwa pengaruh secara individual/parsial belanja modal, pertumbuhan ekonomi terhadap PAD adalah signifikan.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan suatu bentuk pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi atau hubungan yang linier antarvariabel bebas (independent) (Ghozali, 2005). Dalam hal ini variabel bebas adalah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Uji ini muncul karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independent. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* (Ghozali, 2005). Jika hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tidak ada nilai toleransi yang kurang dari 10% ataupun hasil perhitungan VIF yang menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10 dari setiap variabel independent maka didalam model regresi tidak terdapat gejala adanya multikolinieritas antar variabel independent (Ghozali, 2005). Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* dengan menggunakan *software SPSS*.

Tabel 4.10
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Belanja Modal	.986	1.014
	Pertumbuhan Ekonomi	.986	1.014

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10 dari setiap independennya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.2.2.2 Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas mengandung pengertian bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. Cara yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala Heterokedastisitas pada model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Spearman Rank correlation. Data dalam penelitian ini adalah sebanyak $n = 396$, kemudian dengan berpedoman pada taraf signifikan $\alpha = 0.05$. Bila nilai probabilitas (sig) $> 0,05$ maka dinyatakan tidak terjadi gejala Heterokedastisitas. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut :

1. Pengujian Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.11
Nilai Uji Heteroskedastisitas (1)

Variabel Bebas	Sig	α	Keterangan	Kesimpulan
X	0,554	0,05	Tidak Signifikan	Tidak Terjadi heterokedastisitas

Dari tabel di atas diperoleh bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi Heterokedastisitas.

2. Pengujian Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Perantara

Tabel 4.12
Nilai Uji Heteroskedastisitas (2)

Variabel Bebas	Sig	α	Keterangan	Kesimpulan
X	0,379	0,05	Tidak Signifikan	Tidak Terjadi heterokedastisitas
Y1	0,145	0,05	Tidak Signifikan	Tidak Terjadi heterokedastisitas

Dari tabel di atas diperoleh bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi Heterokedastisitas

4.2.2.3 Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi berarti terjadi korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Konsekwensinya varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Model regresinya tidak dapat untuk menaksir nilai variabel dependent pada nilai variabel independent tertentu. Untuk menganalisis adanya autokorelasi yang dipakai adalah uji durbin watson.

Tabel 4.13
Tingkat Autokorelasi (Durbin Watson)

Durbin-Watson	Kesimpulan
Kurang dari 1,08	Ada autokorelasi
1,08 s.d 1,66	Tanpa kesimpulan
1,66 s.d 2,34	Tidak ada autokorelasi
2,34 s.d 2,92	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,92	Ada autokorelasi

Sumber: Algifari, 2000.

1. Pengujian Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam menguji Autokorelasi, digunakan pengujian Durbin-Watson dan menunjukkan hasil sebesar 1,871 dan diketahui $n = 396$ dan 1 variabel bebas yaitu belanja modal dengan tingkat signifikansi 0,05. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi digunakan uji DW (Durbin Watson) dengan melihat koefisien korelasi DW test.

Hasil perhitungan dengan SPSS 10.0 diperoleh nilai statistik Durbin Watson sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson (1)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.317 ^a	.100	.083	1.9925	1.871

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai DW-test berada pada diantara nilai 1,66 s.d 2,34, yaitu dengan nilai DW-test sebesar 1,871, artinya tidak ada autokorelasi.

2. Pengujian Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Perantara

Dalam menguji Autokorelasi, digunakan pengujian Durbin-Watson dan menunjukkan hasil sebesar 1,716 dan diketahui $n = 396$ dan 2 variabel bebas yaitu belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi 0,05. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi digunakan uji DW (Durbin Watson) dengan melihat koefisien korelasi W test.

Hasil perhitungan dengan SPSS 10.0 diperoleh nilai statistik Durbin Watson sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson (2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.728	.727	.7385	1.716

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

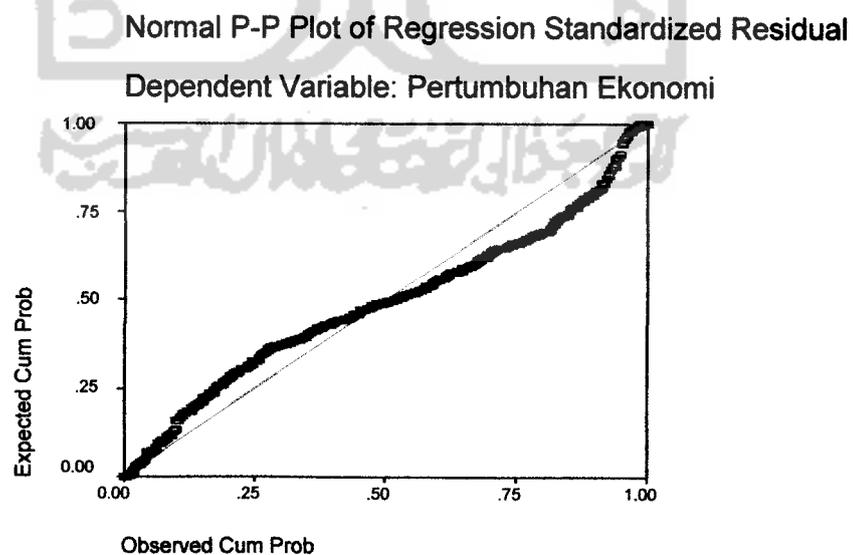
Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai DW-test berada pada diantara nilai 1,66 s.d 2,34, yaitu dengan nilai DW-test sebesar 1,716, artinya tidak ada autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian ini, apakah variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang layak digunakan dalam suatu penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal, sehingga apabila data tersebut memiliki distribusi normal maka uji F dan uji t dapat dilakukan, sementara apabila asumsi normalitas tidak dapat dipenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan statistik F dan t. Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Pengujian Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

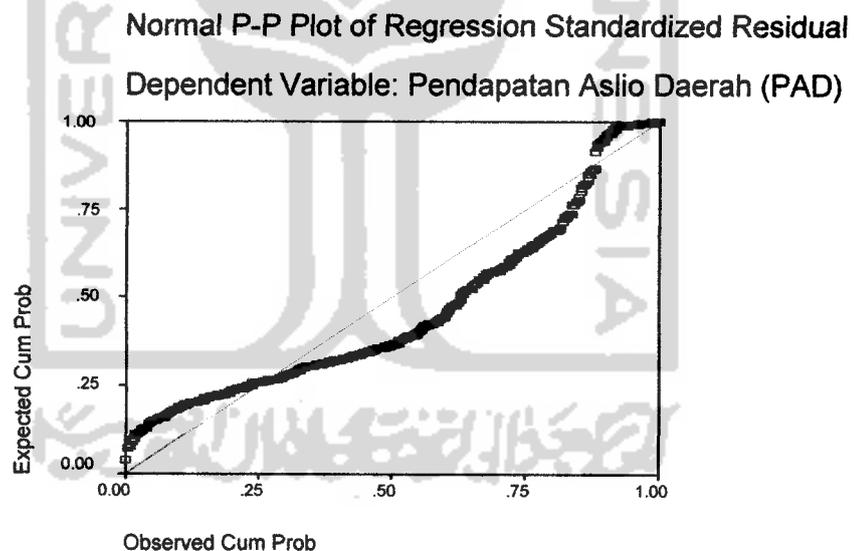


Sumber : Data primer diolah, 2008

Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot menunjukkan bahwa angka probabilitas disekitar garis linier atau lurus. Artinya bahwa seluruh data dari variabel tingkat inflasi memiliki random data yang berdistribusi normal

2. Pengujian Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Perantara.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas
Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD
dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Perantara

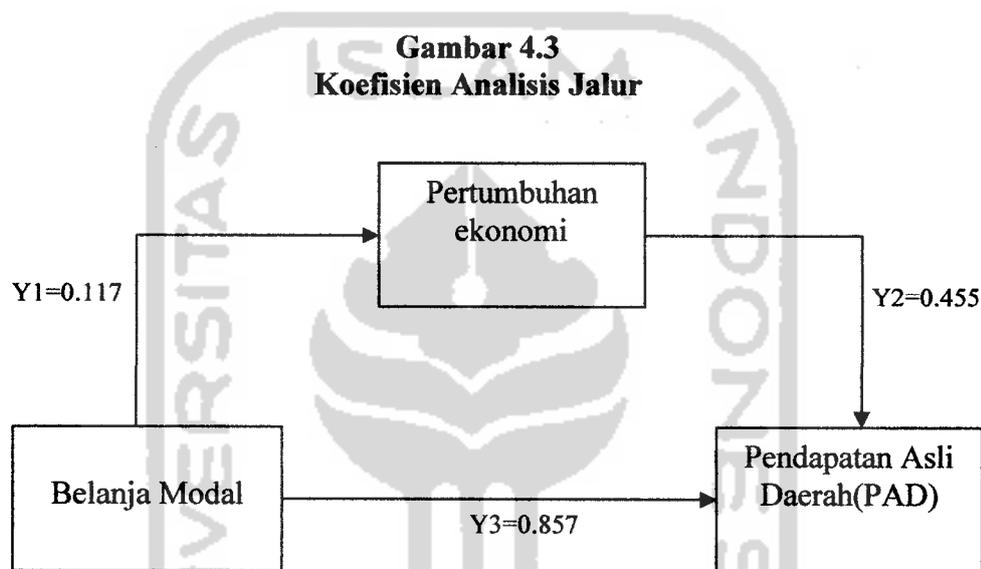


Sumber : Data primer diolah, 2008

Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot menunjukkan bahwa angka probabilitas disekitar garis linier atau lurus. Artinya bahwa seluruh data dari variabel tingkat inflasi memiliki random data yang berdistribusi normal

Hubungan Langsung dan Tidak Langsung

Setelah semua signifikansi hipotesa dan koefisien jalur diketahui sekarang dapat diketahui variable yang mempunyai pengaruh langsung terhadap PAD. Supaya lebih jelas akan digambarkan lagi paradigma penelitian seperti telah digambarkan dimuka.



Tabel 4.16
Signifikansi Antarvariabel

Variabel	t-Sig	α	Keterangan
Belanja modal – pertumbuhan ekonomi	0.020	0.05	signifikan
Pertumbuhan ekonomi – PAD	0.002	0.05	Signifikan
Belanja modal – PAD	0.000	0.05	Signifikan

Nilai koefisien jalur antara predictor belanja modal dengan PAD sebesar 0.857. sedangkan hubungan tidak langsung dapat diketahui dari perkalian antar koefisien jalur $Y1 * Y2$. Nilai koefisien $Y1 = 0.117$ dan $Y2 = 0.455$ jadi $(0.117 * 0.455) = 0.053$. Hasil perkalian menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur tidak

langsung adalah sebesar 0.053. Dengan demikian pengaruh total tidak langsung dari belanja modal terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi adalah $0.857 + (0.117 * 0.455) = 0.910$

Dapat disimpulkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan kata lain semakin besar investasi belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.3.1 Pembahasan Hipotesa Pertama

Hipotesa pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa “belanja modal_{t-1} berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi_t”. Dari hasil analisis menemukan bahwa belanja modal_{t-1} berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi_t. Seperti yang diungkapkan oleh Todoro (1997), yang mengatakan bahwa akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumberdaya manusia merupakan faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wong (2004) yang menyatakan bahwa pergeseran komposisi belanja digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) yang menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Persamaan hasil penelitian ini dikarenakan. Pada tahun 2003, 2004 dan 2005 hampir semua kabupaten/kota di propinsi Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera efektif dan efisien dalam penggunaan. Belanja modal ini digunakan untuk membeli peralatan-peralatan yang mempunyai nilai ekonomi lebih dari satu tahun. Sehingga untuk tahun berikutnya tidak diperlukan belanja modal yang lebih besar, karena barang-barang dianggap lebih bagus dan masih layak pakai.

4.3.2 Pembahasan Hipotesa kedua

Hipotesa kedua menyatakan bahwa “ pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD”. Hasil pengujian hipotesa telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD. Seperti yang dikemukakan oleh Brata (2004), yang mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan asli daerah merupakan eksek dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Seragih (2004) yang menyatakan peningkatan pendapatan asli daerah mempunyai eksek dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan

asli daerah (PAD). Hal yang sama juga dilakukan oleh Bappenas (2003) yang membuktikan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap kenaikan PDRB.

4.3.2 Pembahasan Hipotesa ketiga

Hipotesa ketiga menyatakan bahwa “belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara”. Atau dengan kata lain PAD dipengaruhi oleh belanja modal, sedangkan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga belanja modal berpengaruh tidak langsung ke PAD lewat pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian hipotesa telah membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap PAD dengan melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan public dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) public terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor-sektor perekonomian tersebut, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Belanja Modal pada tahun lalu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Lewat pengujian regresi terlihat signifikansinya sebesar 0.02 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$. Ini membuktikan bahwa belanja modal signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Signifikannya pengaruh belanja modal karena pada tahun 2003, 2004 dan 2005 hampir semua kabupaten/kota di propinsi Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera efektif dan efisien dalam penggunaan. Hal ini dilakukan dengan belanja modal yang digunakan untuk membeli peralatan-peralatan yang mempunyai nilai ekonomi lebih dari satu tahun. Sehingga untuk tahun berikutnya tidak diperlukan belanja modal yang lebih besar, karena barang-barang dianggap lebih bagus dan masih layak pakai.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD). Ditunjukkan dengan nilai signifikansi belanja modal yang lebih kecil dibandingkan dengan α sebesar $0.002 < 0.05$. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah maka semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jateng

dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera.

3. Belanja Modal pada tahun lalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun berjalan. Nilai signifikansinya sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti semakin tinggi pengeluaran untuk belanja modal pemerintah untuk peningkatan fasilitas modal dan investasi maka semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jateng dan DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Sumatera. Belanja modal mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap PAD lewat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diinterpretasikan menjadi semakin besar pengeluaran pemerintah untuk belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Karena studi ini belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya aspek kebijakan publik, aspek politik, aspek manajemen keuangan, aspek penganggaran daerah, dan aspek psikologis personalitas pengambil keputusan pemerintah daerah.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah belum dianalisisnya efek industri yang kemungkinan juga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli masing-masing daerah. Sumbangan yang diberikan

oleh sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah di tiap-tiap daerah tentunya berbeda-beda.

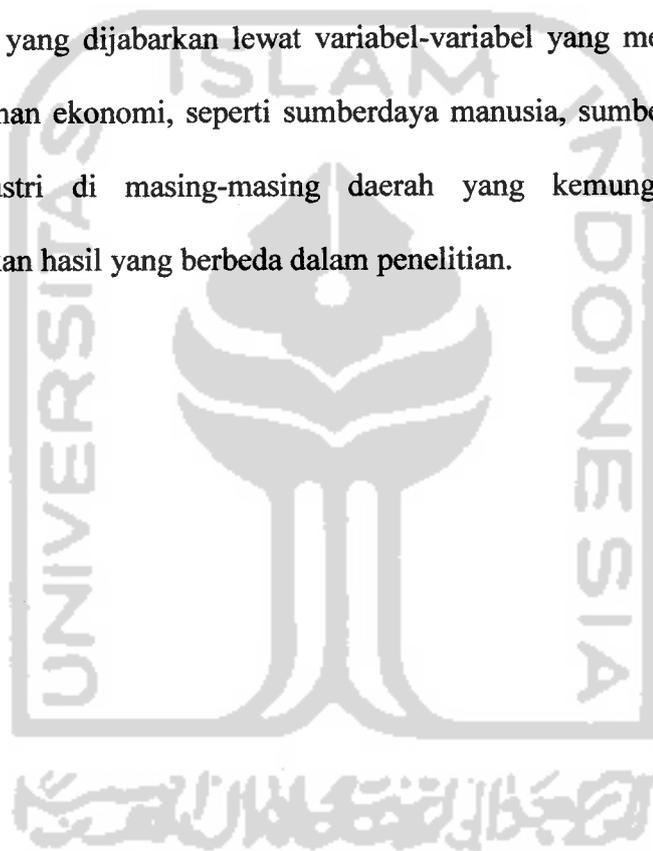
Penelitian ini juga hanya menggunakan beberapa sampel saja dari keseluruhan kabupaten/kota yang ada di wilayah Indonesia, dan data yang digunakan adalah data untuk 4 tahun yaitu tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 sehingga jika digunakan untuk melihat kondisi secara umum di Indonesia belum cukup memadai. Untuk itu pada penelitian-penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan data baik untuk jumlah kurun waktu maupun jumlah wilayah atau daerah.

3. SARAN

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masing-masing daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana (DAU dan DAK) dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah bisa berusaha mengoptimalkan tingkat pendapatan asli daerah, misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas. Cara lain ialah dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/ bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mengelola sumberdaya

yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengimbangi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.

3. Pada penelitian selanjutnya pertumbuhan ekonomi tidak dijadikan sebagai variabel perantara namun dijadikan sebagai variabel independent tersendiri yang dijabarkan lewat variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan industri di masing-masing daerah yang kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda dalam penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu, Anggito. 2005. *format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali)*. Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan pemerintah daerah kabupaten /kota 2000-2002*, BPS , DIY, 2003
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan pemerintah daerah kabupaten /kota 2003-2004*, BPS , Jakarta , 2005
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan pemerintah daerah kabupaten /kota 2004-2005*, BPS , DIY, 2006
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ghozali, Imam.2001. *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro. Semarang

- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. Hal : 127 – 146.
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Publik – akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat .
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Prisma*. LP3ES. Vol. 3 Hal : 3 - 22.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on “Conflict and Dilemmas of Decentralization” by Rudolf Holmes*. The World Bank Research Observer, Hal : 351 - 355.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud, Raksasa Mahi, Robert Simanjutak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Kompas. Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.
- Wahana Komputer. Tim Penelitian dan Pengembangan. 2006. *Pengembangan Analisis Multivariate dengan SPSS 12*. Jakarta : Salemba Empat

Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. 799-816

www.djpk.depkeu.go.id

www.wikipedia.com



Data Penelitian Kabupaten/Kota di Jateng dan D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal				Pertumbuhan Ekonomi				Pendapatan Asli Daersh (PAD)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Kulon Progo	64,862.66	38,203,150.00	28,479,064.00	32,963,810.00	4.29	4.19	4.49	4.77	16,225.50	1,338,700.00	1,399,243.00	1,465,477.00
2	Kab. Bantul	54,985.87	36,938,045.00	40,399,617.00	34,173,510.00	4.46	4.69	5.04	4.99	22,425.15	2,932,375.74	3,080,312.82	3,234,173.00
3	Kab. Gunung Kidul	41,224.26	67,380,080.00	51,723,138.00	40,772,740.00	3.26	3.36	3.43	4.33	13,486.86	2,526,516.26	2,613,269.45	2,726,389.00
4	Kab. Sleman	75,321.54	78,242,738.00	79,198,527.00	73,597,500.00	4.86	5.08	5.25	5.03	4,256,431.00	4,596,292.61	4,837,435.44	5,080,575.00
5	Kota. Yogyakarta	33,998.27	58,140,567.00	68,498,506.00	116,578,690.00	4.50	4.76	5.05	4.87	56,377.46	3,993,837.22	4,195,344.90	4,399,948.00
6	kab. Cilacap	83,876.14	110,115,577.00	67,609,781.00	72,906,545.00	8.59	6.33	6.65	7.72	46,833.92	18,832,659.80	20,122,240.90	21,729,328.80
7	kab. Banyumas	53,111.53	49,885,750.00	38,367,608.00	40,547,709.00	4.51	3.71	4.17	3.21	37,499.52	3,347,157.90	3,486,633.67	3,598,399.16
8	kab. Purbalingga	74,680.25	97,515,390.00	105,114,777.00	97,278,941.00	4.13	3.14	3.35	4.18	23,603.06	1,784,728.21	1,844,532.08	1,921,653.92
9	kab. Banjarnegara	73,343.79	69,535,200.00	37,997,386.00	39,894,256.00	0.85	1.42	3.81	3.95	22,036.39	2,142,274.21	2,225,095.90	2,321,117.64
10	kab. Kebumen	109,304.22	96,670,252.00	66,608,214.00	74,509,919.00	3.88	2.93	1.18	3.21	22,763.20	2,260,404.12	2,287,004.74	2,360,449.90
11	kab. Purworejo	23,118.19	62,308,880.00	40,478,453.00	47,487,578.00	4.88	3.64	4.17	4.85	20,733.84	2,125,411.34	2,214,137.28	2,321,543.04
12	kab. Wonosobo	72,024.50	118,523,214.00	86,788,415.00	93,724,676.00	2.11	2.28	2.34	3.19	26,380.31	1,487,044.15	1,521,807.31	1,570,347.69
13	kab. Magelang	44,322,351.32	45,195,018.00	42,354,772.00	48,142,044.00	4.16	4.01	4.03	4.62	2,565,512.00	2,982,476.10	3,102,727.38	3,245,978.82
14	kab. Boyolali	52,998.43	77,012,210.00	47,784,946.00	58,297,019.00	2.59	4.86	3.42	4.08	24,460.33	3,211,066.50	3,320,736.82	3,456,062.13
15	kab. Klaten	46,809.36	122,313,540.00	26,995,760.00	31,048,528.00	3.91	4.94	4.86	4.59	17,519.44	3,791,474.35	3,975,792.87	4,160,938.70
16	kab. Sukoharjo	36,180.58	64,889,597.00	27,723,710.00	53,617,713.00	2.73	3.97	4.33	4.11	18,555.32	3,629,051.38	3,786,212.72	3,941,788.46
17	kab. Wonogiri	61,954.02	92,754,546.00	71,129,368.00	74,855,000.00	3.18	2.53	4.10	4.15	23,108.19	2,237,790.69	2,329,705.53	2,426,197.98
18	kab. Karanganyar	45,470.82	71,101,589.00	42,722,911.00	63,466,256.00	5.53	5.63	5.98	5.49	23,188.52	3,746,320.10	3,976,278.92	4,188,330.48
19	kab. Sragen	54,040.24	109,572,470.00	43,676,579.00	57,824,756.00	3.42	3.63	4.93	5.16	24,347.95	2,104,533.12	2,208,294.40	2,322,239.43
20	kab. Grobogan	91,890.24	122,799,702.00	88,818,591.00	94,175,763.00	5.77	2.20	3.78	4.47	27,067.57	2,372,922.55	2,462,661.26	2,579,283.26
21	kab. Blora	131,916.38	71,872,431.00	53,557,400.00	61,275,571.00	2.18	3.48	3.82	4.32	25,757.56	1,608,570.83	1,759,635.44	1,731,375.93
22	kab. Rembang	60,562.10	102,093,391.00	22,527,733.00	51,693,428.00	3.37	3.01	4.53	3.56	14,427.18	1,530,588.39	1,583,309.89	1,633,176.71
23	kab. Pati	70,565,142.36	76,286,374.00	54,584,549.00	51,847,741.00	2.91	-1.12	4.25	3.94	3,352,131.74	3,490,303.17	3,640,110.26	3,789,140.34
24	kab. Kudus	44,568,752.33	48,023,863.00	37,587,114.00	99,560,461.00	5.44	5.56	8.70	4.40	30,185.28	9,382,265.63	10,198,388.00	10,630,188.00
25	kab. Jepara	96,792.14	76,681,596.00	50,282,310.00	56,650,370.00	4.01	3.76	4.00	4.23	45,111.75	3,146,838.55	3,272,708.72	3,411,159.47
26	kab. Demak	27,305.06	25,509,269.00	41,502,912.00	22,725,649.00	2.75	2.81	3.42	3.86	14,597.12	2,300,730.50	2,378,897.00	2,470,777.08
27	kab. Semarang	75,449.31	61,022,538.00	41,416,767.00	69,745,726.00	5.45	3.75	1.46	3.11	30,056.62	4,283,284.51	4,345,991.15	4,484,189.54
28	kab. Temanggung	74,606.31	77,384,860.00	56,167,526.00	21,090,391.00	3.05	3.37	3.92	3.99	18,021.90	1,845,221.73	1,917,584.33	1,995,172.89
29	kab. Kendal	168,052.75	114,730,520.00	166,374,461.00	101,753,274.00	3.41	2.85	2.61	2.63	34,830.02	4,061,726.40	4,167,580.39	4,279,793.99
30	kab. Batang	65,935.66	189,489,001.00	47,900,568.00	42,057,441.00	2.17	2.55	2.07	2.80	21,384.88	1,880,020.17	1,918,980.12	1,972,776.84
31	kab. Pekalongan	83,735.51	42,325,748.00	39,912,186.00	25,472,851.00	2.87	3.66	4.39	3.98	22,278.22	2,396,116.15	2,494,565.87	2,587,305.96
No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal				Pertumbuhan Ekonomi				Pendapatan Asli Daersh (PAD)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
32	kab. Pemalang	70,468.82	138,152,434.00	73,321,381.00	59,200,363.00	3.43	3.35	4.04	3.85	25,001.56	2,556,576.12	2,659,854.51	2,770,157.15
33	kab. Tegal	105,858.63	138,423,875.00	77,482,331.00	85,796,474.00	5.14	5.54	5.29	4.72	32,581.30	2,542,121.31	2,677,089.69	2,808,153.13
34	kab. Brebes	92,149.94	127,001,756.00	82,754,067.00	60,315,764.00	5.09	5.09	4.83	4.80	19,793.55	3,930,501.14	4,119,445.93	4,318,218.90
35	Kota. Magelang	40,845.67	62,393,630.00	33,926,417.00	22,200,070.00	3.01	3.74	3.78	5.71	19,191.42	811,631.50	842,302.15	890,399.02
36	Kota. Surakarta	53,360.28	94,446,363.00	13,594,674.00	11,267,923.00	4.97	6.11	5.80	5.15	45,112.37	3,468,276.94	3,669,373.45	3,858,169.65

37	Kota Salatiga	37,900.76	56,547,766.00	47,505,872.00	35,315,939.00	3.63	3.47	-1.40	3.44	17,703.83	713,619.71	735,729.06	766,841.48
38	kota Semarang	79,825,596.54	81,066,747.00	88,124,736.00	93,483,761.00	3.43	4.25	3.57	5.89	122,590.24	14,804,853.10	15,509,313.40	16,361,861.90
39	kota Pekalongan	54,985.74	53,362,384.00	43,314,511.00	51,237,598.00	1.94	3.86	4.07	3.82	11,629.27	1,574,763.64	1,638,791.54	1,701,324.24
40	Kota Tegal	65,408.54	61,241,277.00	94,361,939.00	95,541,872.00	4.82	5.82	5.85	4.87	30,410.52	903,421.50	956,243.56	1,002,821.99



Data Penelitian Kabupaten/Kota di Bali, NTB, dan NTT

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal				Pertumbuhan Ekonomi				Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
1	Jembrana	33,758,426.00	39,273,278.00	33,963,181.00	32,860,900.00	3.06	3.58	4.86	5.00	10,558,476.00	11,055,956.00	9,785,500.00	9,916,280.00
2	Tabanan	39,655,421.00	40,184,207.00	20,430,277.00	13,679,370.00	4.54	4.91	4.73	5.95	37,658,956.00	34,573,611.00	40,022,960.00	42,443,650.00
3	Badung	86,547,832.00	96,186,094.00	110,873,405.00	109,073,590.00	3.90	3.00	5.78	5.61	189,654,238.00	221,438,467.00	273,825,571.00	319,375,010.00
4	Gianyar	59,623,337.00	57,284,676.00	38,009,385.00	26,084,960.00	3.48	3.33	4.95	5.47	32,399,875.00	37,131,725.00	47,818,379.00	55,006,500.00
5	Klungkung	32,655,463.00	40,774,651.00	37,102,630.00	36,493,920.00	5.53	3.10	4.67	5.41	12,395,836.00	12,233,725.00	11,765,694.00	16,403,410.00
6	Bangli	30,124,523.00	33,800,876.00	25,946,383.00	14,146,530.00	3.03	3.38	4.03	4.46	6,987,542.00	7,962,248.00	7,148,732.00	7,692,950.00
7	Karangasem	43,255,963.00	42,428,261.00	28,742,280.00	20,602,370.00	3.09	4.05	4.49	5.12	21,325,589.00	19,513,359.00	18,259,930.00	23,909,590.00
8	Buleleng	80,544,711.00	83,263,788.00	43,185,409.00	33,519,210.00	4.06	4.84	4.98	5.60	17,488,759.00	18,769,249.00	20,895,383.00	22,873,720.00
9	Denpasar	37,699,691.00	38,147,442.00	23,043,537.00	24,558,820.00	5.03	5.31	5.83	6.05	86,988,749.00	88,548,230.00	84,894,469.00	116,302,940.00
10	Lombok Barat	54,342,631.00	40,994,290.00	49,844,850.00	38,657,120.00	3.62	4.36	5.58	4.07	20,817,786.00	21,459,644.00	27,161,136.00	28,374,810.00
11	Lombok Tengah	90,297,000.00	40,824,617.00	41,576,981.00	45,449,540.00	6.28	3.46	4.55	4.30	12,473,291.00	13,526,235.00	15,750,000.00	14,723,430.00
12	Lombok Timur	84,106,759.00	41,098,330.00	27,906,344.00	45,245,720.00	2.58	4.07	4.85	4.57	22,973,804.00	22,175,076.00	28,066,024.00	28,667,030.00
13	Sumbawa	108,870,543.00	64,683,436.00	28,756,440.00	27,941,900.00	3.57	1.28	7.72	4.03	18,732,930.00	20,229,127.00	26,632,763.00	15,809,450.00
14	Dompu	40,164,667.00	27,208,260.00	26,516,031.00	23,687,650.00	3.79	4.61	1.88	2.42	5,988,069.00	8,474,540.00	9,844,590.00	8,824,180.00
15	Bima	57,099,715.00	31,937,640.00	34,391,390.00	26,395,200.00	3.21	5.29	4.92	1.37	15,113,759.00	16,938,306.00	19,010,622.00	10,797,240.00
16	Mataram	50,461,650.00	74,355,407.00	54,955,571.00	56,608,590.00	7.45	10.23	9.53	7.79	13,375,576.00	18,086,493.00	17,104,583.00	21,340,070.00
17	Sumba Barat	52,921,386.00	45,780,270.00	42,177,577.00	53,261,650.00	4.08	4.35	5.06	4.81	4,783,600.00	10,258,829.00	9,866,424.00	12,906,840.00
18	Sumba Timur	46,165,718.00	57,033,550.00	53,882,932.00	52,089,580.00	5.66	4.51	4.71	4.67	3,668,301.00	9,132,718.00	10,597,921.00	10,727,370.00
19	Kupang	28,529,349.00	36,718,060.00	111,897,785.00	27,424,770.00	3.70	3.91	4.43	4.09	14,947,771.00	20,671,981.00	23,325,727.00	14,632,980.00
20	Timur Tengah Selatan	75,586,795.00	133,571,140.00	40,627,793.00	22,857,340.00	6.28	5.18	4.57	3.39	5,537,570.00	19,569,676.00	19,569,676.00	17,319,540.00
21	Timur Tengah Utara	63,535,513.00	49,686,955.00	37,253,092.00	29,016,800.00	4.45	5.85	6.23	4.80	4,436,057.00	5,346,334.00	6,034,630.00	6,374,450.00
22	Alor	46,419,152.00	30,340,080.00	42,829,006.00	57,535,650.00	5.50	5.61	6.00	5.34	5,816,450.00	9,104,675.00	10,973,602.00	9,182,670.00
23	Lembata	67,395,393.00	61,087,996.00	42,894,332.00	40,640,340.00	2.04	3.25	3.43	2.23	3,299,578.00	4,443,116.00	5,543,143.00	4,594,790.00
24	Sikka	43,079,599.00	57,347,183.00	21,681,818.00	18,702,390.00	4.85	4.97	4.68	3.98	5,169,950.00	8,108,415.00	8,988,418.00	10,749,420.00
25	Ende	25,203,875.00	52,993,941.00	20,079,608.00	26,420,290.00	4.64	4.34	4.67	3.54	5,317,280.00	8,728,579.00	10,243,102.00	12,117,800.00
26	Ngada	50,644,489.00	24,367,903.00	34,160,869.00	44,926,530.00	5.06	4.97	5.02	5.03	5,223,777.00	8,407,438.00	9,523,585.00	9,552,630.00
27	Manggarai	55,188,637.00	82,610,446.00	40,674,790.00	47,516,760.00	3.85	4.19	4.24	5.05	6,900,824.00	11,862,261.00	11,243,629.00	10,267,260.00
28	Kupang	19,645,000.00	38,391,180.00	32,223,500.00	46,944,290.00	2.62	2.78	2.64	2.30	50,147,741.00	54,214,493.00	52,336,874.00	57,684,522.00

Data Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal				Pertumbuhan Ekonomi				Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
1	kota Solok	16,939.73	20,368.46	27,187.93	27,155.60	4.34	4.49	5.43	5.86	4,135.16	7,262.07	8,546.78	10,083.36
2	kota Sawahlunto	22,366.41	30,639.32	25,414.05	26,354.90	4.68	-1.52	4.04	1.96	5,170.32	8,434.99	9,871.72	12,804.88
3	kota Padang	38,527.56	30,701.09	17,435.95	34,559.48	5.30	5.55	5.86	5.29	52,951.30	63,932.55	68,646.57	89,747.73
4	kota Padang Panjang	32,023.27	24,007.83	24,761.05	42,819.50	4.49	5.10	5.33	5.74	4,378.54	6,708.00	8,334.18	7,220.42
5	Kab. Tanah Datar	51,684.39	52,219.94	43,107.59	43,250.18	4.14	4.91	5.43	5.28	9,815.09	11,931.50	15,390.49	22,921.80
6	Kab. Solok	57,767.75	54,023.71	48,571.66	26,963.22	4.44	4.90	5.54	5.87	10,647.57	11,769.35	10,448.41	9,154.11
7	kab. Sawahlunto Sijunjung	53,931.54	55,106.23	41,350.75	31,945.59	-0.32	4.59	5.42	5.32	16,661.05	19,949.32	14,352.31	10,356.31
8	Kab. Pasaman	59,405.34	63,896.43	55,202.21	18,513.68	4.96	5.57	6.05	5.61	11,929.67	16,492.39	9,077.58	7,155.22
9	kab. Padang Pariaman	23,666.77	53,587.02	45,096.10	51,603.03	4.70	4.79	5.27	9.96	8,062.96	11,113.23	15,840.39	9,710.52
10	Kab. Agam	53,223.53	38,131.98	17,528.49	14,721.93	4.75	5.29	6.01	6.13	6,944.16	11,183.07	11,681.14	11,596.28
11	kab. Limapuluh Kota	36,263.58	54,594.80	53,467.84	22,180.83	4.43	5.12	5.54	5.78	5,634.71	17,302.18	10,146.66	10,372.84
12	kota Lubuk Linggau	49,381.32	33,844.13	35,941.90	51,456.91	4.82	5.38	5.81	5.99	5,113.83	11,432.28	7,533.24	9,024.67
13	kota Palembang	95,685.42	88,327.97	72,037.03	124,132.83	5.48	5.44	6.42	7.05	51,292.42	63,522.97	61,586.18	78,714.19
14	kab. Muara Enim	124,119.02	98,366.66	122,843.34	124,909.36	2.84	4.34	3.67	4.16	25,035.08	27,901.74	27,059.12	33,494.77
15	Kab. Musi Rawas	89,232.99	88,521.25	87,076.65	83,891.07	3.54	4.09	4.42	5.17	11,002.47	11,365.23	11,893.93	12,749.32
16	Kab. Musi Banyuasin	328,427.32	200,651.57	216,123.15	237,130.61	2.88	3.29	1.89	2.95	27,911.18	23,880.86	9,491.42	13,514.72
17	kab. Labuhan Batu	67,134.28	91,929.79	104,713.10	59,565.27	4.37	4.68	3.80	4.14	13,356.66	26,031.70	27,500.45	25,178.21

Data Penelitian Kabupaten/Kota di Sulawesi

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal				Pertumbuhan Ekonomi				Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
1	kab. Selayar	46,350.72	44,360.92	40,970.60	35,990.72	3.46	4.18	4.50	3.90	2,883.21	4,124.56	3,810.77	6,430.06
2	kab. Sidenreng Rappang	28,507.08	35,195.43	49,234.37	53,802.45	6.34	4.24	3.29	8.25	9,424.92	12,603.16	13,552.51	13,978.02
3	kab. Sinjai	38,434.24	53,468.43	45,932.63	42,727.42	4.55	4.66	5.81	5.23	8,024.23	8,900.06	12,226.30	11,724.57
4	kab. Soppeng	30,800.06	22,786.26	17,852.10	29,968.18	4.71	4.02	5.32	2.85	7,316.97	7,288.47	6,084.12	6,876.13
5	kab. Takalar	30,254.31	37,746.71	19,288.26	27,731.17	3.98	3.98	4.47	5.58	4,377.23	4,958.69	5,225.25	6,356.77
6	kab. Tana Toraja	52,467.78	54,557.81	46,919.51	37,216.39	4.16	2.61	4.24	4.81	11,290.95	13,989.35	16,344.87	13,972.76
7	kab. Wajo	33,561.76	47,685.05	12,043.61	64,775.74	-0.24	4.24	3.13	5.97	11,555.26	14,788.53	13,550.27	20,981.29
8	kota Pare-pare	31,015.08	52,057.04	33,016.07	40,912.30	5.68	5.00	6.23	5.98	10,909.26	15,185.94	16,951.97	18,880.25
9	kota Makassar	65,558.33	79,206.44	61,583.69	63,110.90	7.14	8.60	10.24	7.16	58,465.27	78,684.69	85,074.92	99,841.78
10	kab. Pangkajene dan kepulauan	65,526.65	55,357.37	36,478.38	37,967.96	3.28	1.98	6.19	5.61	22,498.93	25,466.80	26,904.30	29,600.11
11	kab. Maros	31,794.96	36,079.09	36,466.21	37,589.64	3.22	3.84	2.17	3.11	10,923.19	10,694.55	12,027.55	13,652.33
12	kab. Bantaeng	42,661.05	41,253.36	42,385.47	45,073.33	5.82	4.89	4.22	4.35	4,163.84	5,642.33	6,983.05	5,709.53
13	kab. Barru	44,946.30	40,266.13	80,153.54	54,092.02	5.86	5.96	4.22	4.94	6,432.80	8,739.34	10,014.35	7,885.30
14	kab. Bone	25,085.41	71,849.48	60,363.93	62,400.17	5.07	4.56	2.11	4.31	18,553.34	15,952.40	17,690.39	17,234.56
15	kab. Bulukumba	32,760.77	33,587.84	32,334.06	27,238.56	3.88	3.64	4.69	4.48	9,451.92	1,047.87	11,515.06	10,638.39
16	kab. Enrekang	32,421.18	43,590.59	57,448.52	59,477.42	5.17	5.26	5.34	5.90	7,106.89	10,430.39	10,463.56	12,563.60
17	kab. Gowa	24,291.72	52,741.84	46,843.73	48,945.53	4.60	4.02	4.87	5.74	15,331.83	21,865.20	19,841.51	21,321.50
18	kab. Jeneponto	50,780.75	49,740.56	39,578.85	61,426.62	4.15	3.76	2.07	1.21	4,876.36	4,587.69	5,183.92	6,190.27
19	kab. Luwu	46,301.72	42,424.48	54,005.30	56,245.74	5.63	7.75	6.11	7.16	9,231.96	7,284.89	10,104.75	11,712.58
20	kab. Luwu utara	80,915.63	80,738.12	29,061.41	31,562.24	-1.11	8.08	8.02	8.69	30,961.43	23,828.81	16,230.85	12,206.16
21	kab. Buton	14,843.34	52,616.70	45,248.46	60,910.78	6.25	0.23	7.72	7.80	8,936.38	10,717.96	10,122.05	9,108.24
22	kab. Kendari	18,921.93	36,235.41	26,827.58	22,905.41	5.99	6.63	9.18	8.95	8,042.35	6,756.10	14,112.54	6,364.64
23	kab. Kolaka	11,427.55	26,514.25	47,020.77	33,682.30	12.76	11.62	6.12	5.96	11,419.90	11,865.46	10,134.00	10,062.73
24	kota Bau-Bau	35,986.83	39,016.17	36,264.57	40,587.98	1.98	2.53	7.24	7.93	3,739.86	6,181.20	6,908.13	7,054.65

Data Penelitian Kabupaten/Kota di Kalimantan

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal				Pertumbuhan Ekonomi				Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Sambas	7,642.68	44,868.22	36,491.51	39,041.04	2.98	4.73	4.96	5.76	7,642.68	7,597.95	10,267.95	9,502.19
3	Kab. Landak	1,600.76	40,504.27	43,791.95	49,174.70	5.45	3.34	4.18	3.43	1,600.76	1,975.27	2,167.14	2,630.73
4	Kab. Pontianak	6,885.56	49,818.68	35,700.12	50,754.28	6.99	-1.83	1.55	3.40	6,885.56	8,914.56	9,505.33	15,284.50
5	Kab. Sanggau	6,564.77	38,355.25	49,592.29	50,320.75	3.40	3.76	3.62	4.93	6,564.77	8,575.08	10,343.17	11,160.26
6	Kab. Ketapang	19,414.66	75,836.11	72,665.99	104,095.60	7.16	20.31	8.65	9.18	19,414.66	10,241.43	12,185.55	10,683.28
7	Kab. Sintang	17,904.84	45,443.82	57,699.73	35,797.26	2.92	4.58	2.88	2.66	17,904.84	9,119.53	17,005.36	6,969.04
8	Kab. Kapuas Hulu	21,807.54	87,792.28	45,811.72	51,364.11	4.05	3.46	0.84	-1.51	21,807.54	5,548.49	6,002.25	4,331.30
9	Kota Pontianak	29,597.31	64,731.36	27,473.93	29,474.21	5.40	4.36	4.89	4.95	29,597.31	31,320.42	34,774.39	41,514.07
10	Kota Singkawang	1,843.55	28,620.44	21,010.29	35,676.74	4.21	4.29	4.66	5.36	4,956.33	5,070.23	4,933.31	7,060.68
11	Kab. Kotawaringin Barat	90,799.94	49,154.83	63,428.47	95,889.10	4.15	6.23	6.06	6.15	16,447.69	17,780.18	21,585.91	26,523.63
12	Kab. Kotawaringin Timur	114,867.97	105,859.31	96,701.07	76,942.68	3.66	4.55	5.28	4.98	40,375.24	29,016.33	35,820.69	35,348.13
14	Kab. Barito Selatan	72,724.45	30,137.90	51,127.22	43,744.58	1.16	2.84	3.79	5.07	8,595.53	4,923.19	5,636.23	6,519.68
15	Kota Palangkaraya	45,822.68	41,068.82	17,549.42	28,856.07	1.56	3.63	5.33	5.45	7,741.34	8,981.60	10,107.04	13,666.41
16	Kab. Tanah Laut	48,820.40	40,910.73	23,895.40	34,370.92	4.49	4.64	4.77	5.13	6,172.45	8,539.15	13,243.90	32,123.83
18	Kab. Banjar	62,845.53	39,338.19	45,988.48	35,533.23	4.54	5.11	5.21	4.23	7,015.23	9,256.06	13,555.81	13,831.60
19	Kab. Barito Kuala	54,389.39	47,316.76	65,956.90	68,903.90	2.07	2.73	2.88	-2.62	9,192.26	9,297.93	9,299.00	8,708.05
20	Kab. Tapin	48,250.05	39,415.15	40,084.49	49,324.62	3.84	3.87	4.23	4.38	7,371.79	8,314.51	10,917.66	15,462.45
21	Kab. Hulu Sungai Selatan	37,879.75	22,753.66	20,750.43	27,390.31	3.25	4.00	4.37	3.86	6,757.96	10,150.62	11,916.41	10,729.04
22	Kab. Hulu Sungai Tengah	52,644.42	35,046.61	28,011.08	30,896.99	4.91	4.54	4.12	4.62	8,896.30	11,677.76	10,269.47	10,423.42
23	Kab. Hulu Sungai Utara	44,118.30	26,630.35	18,209.03	32,725.25	3.92	3.95	4.52	3.41	5,607.97	7,349.25	5,152.53	6,586.26
24	Kab. Tabalong	46,934.59	35,579.49	17,420.82	33,517.84	9.64	3.52	1.62	2.99	18,394.13	14,057.16	16,356.10	16,400.69
25	Kota Banjarmasin	40,303.37	45,457.41	44,764.83	49,415.33	2.74	6.54	4.38	4.81	24,300.89	29,166.01	38,328.02	41,181.73
27	Kota Samarinda	230,905.77	263,103.45	135,102.77	114,873.83	10.32	9.52	9.00	8.05	45,507.02	55,188.76	53,115.34	71,076.77

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.317 ^a	.100	.083	1.9925

- a. Predictors: (Constant), Belanja Modal
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.768	1	21.768	5.483	.020 ^a
	Residual	1564.273	394	3.970		
	Total	1586.041	395			

- a. Predictors: (Constant), Belanja Modal
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.232	.400		13.093	.000		
	Belanja Modal	.152	.065	.117	2.342	.020	1.000	1.000

- a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.853 ^a	.728	.727	.7385

- a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal
 b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	573.377	2	286.689	20.695	.000 ^a
	Residual	214.323	393	.545		
	Total	787.700	395			

- a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal
 b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.670	.177		3.779	.000
	Belanja Modal	.785	.024	.857	5.358	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	.132	.019	.455	3.716	.002

- a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Sederhana

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nonparametric Correlations

Correlations

			Belanja Modal	Residual
Spearman's rho	Belanja Modal	Correlation Coefficient	1.000	-.030
		Sig. (2-tailed)	.	.554
		N	396	396
	Residual	Correlation Coefficient	-.030	1.000
		Sig. (2-tailed)	.554	.
		N	396	396

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

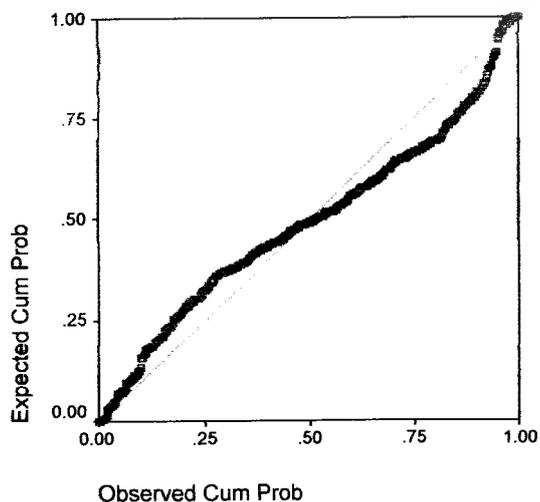
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.317 ^a	.100	.083	1.9925	1.871

- a. Predictors: (Constant), Belanja Modal
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi



Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Belanja Modal	.986	1.014
	Pertumbuhan Ekonomi	.986	1.014

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nonparametric Correlations

Correlations

			Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Residual
Spearman's rho	Belanja Modal	Correlation Coefficient	1.000	-.176**	.044
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.379
		N	396	396	396
	Pertumbuhan Ekonomi	Correlation Coefficient	-.176**	1.000	.073
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.145
		N	396	396	396
	Residual	Correlation Coefficient	.044	.073	1.000
		Sig. (2-tailed)	.379	.145	.
		N	396	396	396

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.728	.727	.7385	1.716

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil Uji Normalitas

